

TESIS

KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEKAKAN  
HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang )

Komisi Pembimbing :

1. Prof.Dr.Ismansyah,S.H.,M.H
2. Fadillah Sabri,S.H.,M.H.

PROGRAM KEKHUSUSAN :  
HUKUM PIDANA



Diajukan Oleh:

PELDI NOFRIZAL  
BP. 1320112062

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG

2017

**KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP  
PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)**

**(Nama : Peldi Nofrizal, BP :1320112062, PK : Hukum Pidana, Jumlah hlm : 103,  
Tahun 2017)**

**ABSTRAK**

Efektifnya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana peredaran obat dan makanan ilegal sangat dipengaruhi oleh bekerjanya subsistem terkait dengan penyelenggaraan proses penegakan hukum sesuai tugas dan wewenang yang menjadi dasar hukumnya, serta berkoordinasi dengan baik dalam tahap penyidikan yakni antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri. Koordinasi merupakan aspek penting untuk terlaksananya proses penegakan hukum yang baik sesuai dengan tujuan hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi fungsional antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM Padang dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana peredaran obat-obatan dan makanan ilegal di wilayah hukum Polresta Padang dilakukan sejak dikirimnya SPDP, penyerahan berkas perkara (Tahap I), penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar melalui Penyidik Polri Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar. Pemberian bantuan penyidikan oleh Polri kepada PPNS BPOM Padang apabila ada permintaan tertulis. PPNS BPOM Padang tidak meminta bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri dengan alasan bahwa PPNS BPOM Padang berusaha melakukan upaya persuasif terhadap tersangka agar kooperatif untuk datang memberikan keterangan kepada PPNS BPOM Padang. Kendala dalam pelaksanaan koordinasi yaitu jumlah personil PPNS BPOM Padang belum memadai, kurang harmonis hubungan koordinasi, belum adanya bantuan penyidikan dari penyidik Polri serta kurangnya personil Polri yang mengemban fungsi Korwas PPNS pada Polda Sumbar. Hendaknya penyidik Polri (Korwas) berperan aktif dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM tanpa harus menunggu permintaan bantuan penyidikan dari PPNS. Diharapkan kepada PPNS BPOM Padang untuk meningkatkan koordinasi dengan meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Polri mulai dari awal penyidikan sampai selesainya proses penyidikan. Perlu adanya kerjasama antara Polri dan BPOM dalam menentukan peredaran obat dan makanan termasuk tindak pidana atau tidak.

**Kata Kunci : Koordinasi Fungsional, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

# **THE FUNCTIONAL COORDINATION BETWEEN THE INVESTIGATOR OF CIVIL SERVANT AND POLICE INVESTIGATOR IN THE ENFORCEMENT OF LAW TOWARDS THE CIRCULATION OF DRUGS AND ILLEGAL FOOD**

**(Case Study in The Jurisdictions of Polresta Padang)**

**(Name: Peldi Nofrizal, BP :1320112062, PK : Criminal Law, Total Page : 103, year 2017)**

## **ABSTRACT**

The effectiveness of the enforcement of law to the eradication of drugs crime and illegal food is strongly influenced by the operation of related subsystem with implementation of law enforcement in accordance with the task and authorized which have become its legal basis, and to make a well coordination in the stage of investigation that is between the investigator of the civil servant (PPNS) and the police investigator. Coordination is the significant aspect to implement the process of a good law implementation in accordance with the purpose of law set by legislation. This research is the law research about empirical with the methodology of juridical sociological. Through the results of the research have been acknowledged that the implementation of the functional coordination between the investigator of civil servant of BPOM Padang and the police investigator about the investigation of drugs crime and illegal food in the law region of Polresta Padang is carried out since the SPDP has been sent, the delivery of the file case (Tahap I), the submission of suspect and evidence (Tahap II) to the high court of West Sumatera with the help of the police investigator to the Ditreskrimsus Polda of West Sumatera. The provision of help of the investigation given by police to PPNS BPOM Padang if there is a formal written request. PPNS BPOM Padang do not ask the help of investigation to the police investigator with the reason that PPNS BPOM Padang have tried to make the persuasive efforts towards the suspect in order to be cooperative to give statement to the PPNS BPOM Padang. The constraints in running the coordination is the number of personnel of PPNS BPOM Padang is not adequate, lack of harmonization through coordination, there investigator and the lack of number of police personnel who carry out the function of korwas PPNS to Polda of West Sumatera. Police investigator (Korwas) should be active in the process of the investigation done by PPNS BPOM with out waiting for the request of help in investigation from PPNS. It is expected that PPNS BPOM Padang to improve the coordination by asking the guidance and assistance of the investigation to police investigator starting from the beginning of the investigation to the investigation ends. There is a need of cooperation between police and BPOM in deciding the circulation of drugs and food whether it is a crime or it is not.

**Keywords : The Functional Coordination, and the investigator of Civil Servant.**